

LAPORAN DATA EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEMESTER 1 TAHUN 2025



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

TIM PENYUSUN

Laporan Data Ekonomi Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025

Pengarah

Dr. Said Sudrajad, S.Sos, M.Si

Penanggung Jawab

La Ode M. Faisal, S.Pi. M.Ling

Penyunting

La Ode M. Faisal, S.Pi. M.Ling . Fakhri Rakhmatullah, S.St.Pi

Pengolah Data

Faladiastra Oktasiana, S.Pi . Yustika Andriani, S.Pi . Sri Rahayu, S.E . Deni Firdaus,
S.Pi . Richi Budiman, S.Pi . Mansurdin, S.Pi . Septo Alfino, S.IP . Sulastr
Tampubolon, S.Pi . Hendriyansyah . Zulhendra, S.St.Pi . T. Decky Kurniawan, S.Pi .
Selviana Sari, S.Pi . Nendra Ilyadi, S. Sos . Robi Rafika, S.Pi . Rafiqul Muhammad Ichsan,
S.Si

Penulis Naskah dan Penata Letak

Fakhri Rakhmatullah, S.St.Pi . Faladiastra Oktasiana, S.Pi . Yustika Andriani, S.Pi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas Karunia dan Rahmat-Nya Laporan Data Ekonomi Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Kompilasi Data Ekonomi Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025 merupakan laporan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Laporan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan demi terwujudnya Laporan Kompilasi Data Ekonomi Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan data bagi instansi pemerintah, masyarakat, dan pengguna data lainnya.

Tanjungpinang, Maret 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau,



Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196905042000031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tujuan	9
1.3. Ruang Lingkup	9
1.4. Sistematika Penyusunan	10
BAB II KONSEP DAN DEFINISI	12
BAB III PERKEMBANGAN DATA EKONOMI PERIKANAN	16
3.1. Volume Produksi Perikanan Tangkap	16
3.2. Volume Produksi Perikanan Budidaya	18
3.3. Volume Produksi Pengolahan Perikanan	25
3.4. Volume Ekspor Perikanan.....	27
3.5. Jumlah Perahu/Kapal Perikanan	29
3.6. Ketersediaan Stok Ikan.....	31
3.7. Jumlah <i>Cold storage</i>	33
3.8. Luas Kawasan Konservasi Perairan.....	35
3.9. Volume Benih Ikan Bermutu dan Induk Unggul di Provinsi Kepulauan Riau	40
BAB IV PENUTUP	44
4.1. Kesimpulan	44
4.2. Saran	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Volume Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Semester 1 Tahun 2024 dan 2025.....	15
Tabel 1 Volume Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025.....	18
Tabel 2 Volume Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025	19
Tabel 4 Jumlah Produksi Budidaya Ikan Laut Berdasarkan Jenis Komoditas per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025	21
Tabel 5 Jumlah Produksi Budidaya Ikan Air Payau Berdasarkan Jenis Komoditas per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025	22
Tabel 6 Jumlah Produksi Budidaya Air Tawar Berdasarkan Jenis Komoditas per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025.....	23
Tabel 7 Volume Produksi Pengolahan Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025	24
Tabel 8 Volume dan Nilai Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan Menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025.....	26
Tabel 9 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Menurut Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025.....	28
Tabel 10 Ketersediaan Stok Ikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025	31
Tabel 11 Jumlah Cold storage Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025	33
Tabel 12 Luas Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Kepulauan Riau	35
Tabel 13 Pembagian Zona pada Kawasan Konservasi di Prov Kepulauan Riau....	36

Tabel 14 Luasan Ekosistem Pesisir di Kabupaten/Kota pada Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau	38
Tabel 15 Volume Benih Ikan Bermutu Menurut Jenis Ikan di Provinsi Kepulauan Riau (UPTD BBI Pengujan), Tahun 2025	39
Tabel 16 Volume Induk Unggul Menurut Jenis Ikan di Provinsi Kepulauan Riau (UPTD BBI Pengujan), Tahun 2025	41
Tabel 17 Nilai Retribusi Penjualan Ikan UPTD BBI Pengujan, Tahun 2023, 2024 dan 2025	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Volume Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Semester 1 Tahun 2024 dan 2025.....	16
Gambar 3 Volume Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025.....	18
Gambar 3 Volume Produksi Pengolahan Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025	25
Gambar 4 Volume dan Nilai Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan Menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025	27
Gambar 5 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Menurut Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025.....	29
Gambar 6 Ketersediaan Stok Ikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025	31
Gambar 7 Jumlah Cold storage Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025	33
Gambar 8 Peta Kawasan Konservasi Timur Pulau Bintan	37
Gambar 9 Peta Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Bintan II Provinsi Kepulauan Riau.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis unik, di mana sekitar 96% dari total luas wilayahnya adalah perairan laut. Dengan ribuan pulau yang tersebar di sepanjang lintasan pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam, sektor kelautan dan perikanan secara alamiah menjadi tulang punggung perekonomian daerah serta sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat pesisir.

Kekayaan sumber daya kelautan di Kepulauan Riau, yang mencakup potensi perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 serta potensi perikanan budidaya yang luas, memerlukan pengelolaan yang terukur dan berkelanjutan. Di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan iklim yang memengaruhi ekosistem laut, ketersediaan data ekonomi yang akurat dan tepat waktu menjadi instrumen krusial bagi pemerintah daerah. Data tersebut berfungsi sebagai basis dalam perumusan kebijakan strategis, pemantauan tren produksi, hingga evaluasi dampak program pembangunan kelautan yang telah dijalankan.

Memasuki Semester 1 Tahun 2025, sektor perikanan Kepulauan Riau menghadapi berbagai peluang sekaligus tantangan, mulai dari peningkatan permintaan pasar ekspor hingga perlunya penguatan hilirisasi industri perikanan di tingkat lokal. Oleh karena itu, Laporan Kompilasi Data Ekonomi Perikanan dan Kelautan ini disusun untuk mendokumentasikan capaian kinerja sektor perikanan di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui laporan ini, diharapkan gambaran mengenai volume produksi tangkap, budidaya, hasil pengolahan, serta kinerja ekspor dapat terpetakan dengan jelas. Informasi yang disajikan tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengoptimalkan potensi sumber daya laut demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang berkelanjutan.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dalam kegiatan Kompilasi Data Ekonomi Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang ekonomi perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya, yaitu :

1. Mengetahui Jumlah volume dan nilai produksi perikanan di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Mengetahui Jumlah Volume Produksi Olahan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau;
3. Mengetahui Jumlah volume dan nilai ekspor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau;
4. Mengetahui Jumlah *cold storage* di Provinsi Kepulauan Riau;
5. Mengetahui Jumlah perahu/kapal penangkap ikan di Provinsi Kepulauan Riau;
6. Mengetahui Jumlah Ketersediaan Stok Ikan di Provinsi Kepulauan Riau;
7. Mengetahui Luas Kawasan Konservasi Peraliran di Provinsi Kepulauan Riau;
8. Mengetahui Jumlah Benih Ikan Bermutu dan Induk Unggul di Provinsi Kepulauan Riau.

1.3. Ruang Lingkup

Laporan ini membahas berbagai aspek penting terkait dengan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau pada semester pertama tahun 2025. Fokus utama laporan ini adalah untuk menyajikan data dan analisis mengenai volume produksi perikanan, baik yang berasal dari perikanan tangkap maupun budidaya, serta perkembangan dalam industri pengolahan hasil perikanan. Data mengenai volume produksi pengolahan perikanan akan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor pengolahan terhadap perekonomian daerah.

Selain itu, laporan ini juga akan membahas volume ekspor perikanan dari Provinsi Kepulauan Riau, termasuk jenis produk perikanan yang diekspor serta negara tujuan ekspor utama. Aspek ini penting untuk menggambarkan peran sektor perikanan dalam perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Laporan ini juga akan mencakup informasi mengenai jumlah kapal perikanan yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau. Data ini meliputi jenis kapal, seperti kapal tangkap, kapal pengangkut, dan kapal pengolahan, yang berperan penting dalam menunjang kegiatan perikanan di wilayah ini.

Aspek lain yang akan dibahas adalah ketersediaan stok ikan di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Ketersediaan stok ikan merupakan indikator penting dalam memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan menghindari penangkapan ikan yang berlebihan. Oleh karena itu, laporan ini akan menganalisis kondisi stok ikan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya.

Laporan ini juga akan menyajikan informasi mengenai jumlah dan kapasitas fasilitas *cold storage* yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. *Cold storage* sangat penting dalam mendukung distribusi hasil perikanan, menjaga kualitas produk, serta mengurangi kerugian pascapanen. Oleh karena itu, analisis mengenai jumlah dan efisiensi *cold storage* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.

Terakhir, laporan ini akan mengulas luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Kepulauan Riau, yang berfungsi untuk melindungi ekosistem laut dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Kawasan konservasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta memastikan bahwa kegiatan perikanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, ruang lingkup laporan ini mencakup semua aspek yang terkait dengan sektor perikanan dan kelautan yang relevan di Provinsi Kepulauan Riau pada semester pertama tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan, perencanaan sektor perikanan, serta pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan di provinsi ini.

1.4. Sistematika Penyusunan

Laporan Data Ekonomi Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025 disusun secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca. Adapun sistematika penulisan laporan ini dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab 1, menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika penulisan laporan.

Bab 2, menjelaskan tentang konsep dan definisi yang relevan dengan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau

Bab 3, menjelaskan tentang perkembangan ekonomi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, terkait volume produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan perikanan, volume ekspor perikanan, jumlah kapal perikanan yang beroperasi, ketersediaan stok ikan, jumlah dan kapasitas fasilitas *cold storage* yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, luas kawasan konservasi perairan serta jumlah benih ikan bermutu dan induk unggul yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Bab 4, menjelaskan tentang Kesimpulan dari seluruh rangkaian data yang telah dianalisis serta saran-saran strategis bagi pengembangan sektor perikanan dan kelautan di masa mendatang guna menjamin keberlanjutan sumber daya di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

Laporan ini mengacu pada berbagai konsep dan definisi yang relevan dengan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa istilah penting yang digunakan dalam laporan ini merujuk pada regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Berikut adalah beberapa konsep dan definisi utama berdasarkan regulasi yang berlaku:

- a. Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dan hasil laut lainnya dari perairan menggunakan alat tangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Pasal 1 ayat 4), perikanan tangkap mencakup segala kegiatan penangkapan ikan, baik secara komersial maupun untuk konsumsi rumah tangga.
- b. Perikanan budidaya merujuk pada kegiatan pembiakan ikan dan organisme perairan lainnya dalam kondisi yang terkontrol di wadah atau kolam. Dalam UU No. 31 Tahun 2004, perikanan budidaya didefinisikan sebagai usaha untuk membudidayakan ikan dalam berbagai sistem untuk tujuan konsumsi maupun komersial.
- c. Perikanan budidaya air laut adalah upaya terukur untuk memelihara dan membesarkan komoditas laut seperti ikan kerapu ataupun kakap dalam lingkungan terkontrol bukan sekadar menangkapnya dari alam. Dengan menggunakan sarana seperti Keramba Jaring Apung atau tali panjang, proses ini memastikan pertumbuhan biota lebih terjaga dan hasilnya lebih stabil, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjaga kelestarian stok ikan di laut lepas.
- d. Perikanan budidaya air tawar adalah upaya memelihara dan membesarkan biota air seperti ikan nila, lele, mas, hingga udang galah dalam lingkungan yang sepenuhnya dikelola oleh manusia. Melalui pengaturan pakan dan kualitas air yang terukur, proses ini bertujuan untuk menghasilkan sumber protein yang stabil, efisien, dan lebih mudah dijangkau dibandingkan hasil laut, sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga dan ketahanan pangan lokal.

- e. Perikanan budidaya air payau adalah upaya memelihara biota yang memiliki daya tahan tinggi terhadap perubahan kadar garam, seperti udang vaname, bandeng, atau kepiting soka. Dengan memanfaatkan pasang surut air laut dan aliran air tawar, proses ini menjadi jembatan strategis untuk menghasilkan komoditas bernilai ekonomi tinggi secara intensif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada ekosistem laut lepas maupun daratan murni.
- f. Perikanan budidaya rumput laut adalah upaya menanam dan membesarkan bibit rumput laut seperti jenis *Eucheuma cottonii* atau *Gracilaria* menggunakan media tali panjang (*longline*) atau rakit apung. Proses ini sangat ramah lingkungan karena tidak memerlukan pakan tambahan maupun bahan kimia, melainkan hanya mengandalkan fotosintesis dan mineral alami laut untuk menghasilkan komoditas bernilai tinggi yang menjadi bahan baku utama industri pangan, kosmetik, hingga farmasi.
- g. Produksi pengolahan perikanan mencakup hasil pengolahan produk perikanan mentah menjadi produk makanan siap saji atau lainnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pengolahan Sumber Daya Perikanan, industri pengolahan perikanan harus mengikuti standar kualitas dan pengawasan agar memenuhi syarat untuk dikonsumsi.
- h. Ekspor perikanan adalah kegiatan penjualan dan pengiriman produk perikanan ke luar negeri. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perdagangan, ekspor perikanan harus mematuhi regulasi ekspor dan standar internasional mengenai keamanan pangan dan keberlanjutan sumber daya laut.
- i. Kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan hasil tangkapan, atau pengolahan ikan di laut. Definisi kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 tentang Kapal Perikanan, yang mengatur tentang ukuran, jenis, dan kapasitas kapal untuk kegiatan perikanan.
- j. Stok ikan merujuk pada jumlah atau populasi ikan di perairan yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perikanan. UU No. 31 Tahun 2004 mengatur tentang pentingnya pengelolaan stok ikan secara berkelanjutan dengan

memperhatikan daya dukung lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut.

- k. *Cold storage* adalah fasilitas penyimpanan hasil perikanan pada suhu rendah untuk menjaga kualitas dan kesegarannya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2011 tentang Pengolahan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan mengatur standar fasilitas pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan, termasuk *cold storage*.
- l. Kawasan konservasi perairan adalah wilayah laut yang ditetapkan untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 1 ayat 8), kawasan konservasi berfungsi untuk melestarikan ekosistem laut dan sumber daya alam di dalamnya.
- m. Benih ikan bermutu adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva yang memenuhi spesifikasi teknis ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), harus bebas dari patogen (penyakit ikan berbahaya), tidak cacat fisik, memiliki keseragaman ukuran yang tinggi (biasanya di atas 80%), dan memiliki respon (*vigor*) yang kuat terhadap rangsangan.
- n. Induk unggul adalah ikan pada tahapan perkembangan tertentu yang memiliki nilai genetik tinggi dan memenuhi standar fenotipe. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta peraturan pelaksanaannya (seperti Permen KP No. 21 Tahun 2025).
- o. Retribusi adalah pembayaran wajib dari individu atau badan kepada kas daerah sebagai imbalan (*kontraprestasi*) atas jasa yang diberikan oleh pemerintah, seperti pemakaian pasar, parkir, pengangkutan sampah, hingga perizinan tertentu. Berbeda dengan pajak yang sifatnya umum, dana retribusi ini secara spesifik ditujukan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan layanan publik tersebut agar kualitasnya tetap terjaga dan dapat terus dinikmati oleh masyarakat.

Dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku, laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau. Penggunaan konsep-konsep yang jelas dan terukur menurut hukum diharapkan dapat memberikan

panduan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor ini secara berkelanjutan.

BAB III

PERKEMBANGAN DATA EKONOMI PERIKANAN

3.1 Volume Produksi Perikanan Tangkap

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap. Letak geografisnya yang terdiri dari banyak pulau dan perairan yang kaya akan sumber daya alam menjadikan perikanan sebagai salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian daerah ini. Sektor ini tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak nelayan dan pelaku industri terkait.

Tabel 4 Volume Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

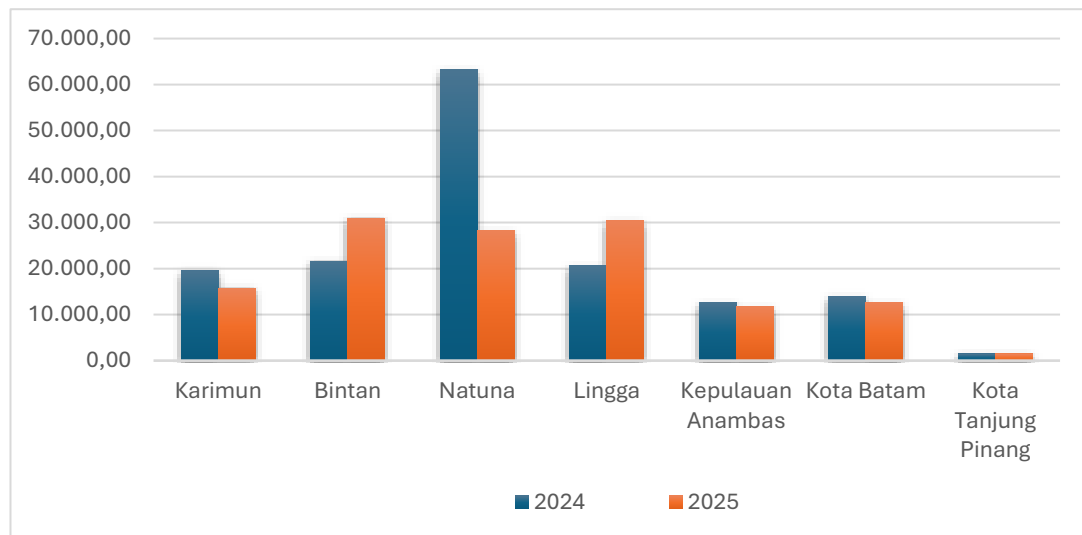
Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Volume (ton)		Nilai Produksi (000 Rp)	
		2024	2025*)	2024	2025*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2101	Karimun	19.538,58	15.758,55	711.756.700	468.836.122
2102	Bintan	21.616,60	30.925,00	378.260.855	750.432.935
2103	Natuna	63.259,97	28.350,60	1.736.990.432	560.512.250
2104	Lingga	20.653,38	30.432,86	861.860.769	1.852.208.364
2105	Kepulauan Anambas	12.704,16	11.816,36	410.588.196	486.689.365
2171	Batam	13.936,70	12.693,88	477.251.219	537.866.905
2172	Tanjung Pinang	1.509,60	1.472,67	59.456.155	64.758.063
2100	Kepulauan Riau	153.218,99	131.449,93	4.636.164.326	4.721.304.005

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

*Keterangan: *) Data Sementara*

Berdasarkan data produksi perikanan Provinsi Kepulauan Riau periode 2024–2025, terlihat adanya pergeseran signifikan dalam jumlah produksi (volume) dan nilai ekonomi di berbagai wilayah. Secara agregat, volume produksi provinsi mengalami penurunan dari 153.218,99 ton pada tahun 2024 menjadi 131.449,93 ton pada tahun 2025. Penurunan volume secara total ini sangat dipengaruhi dengan apa yang terjadi di Kabupaten Natuna, di mana produksi merosot lebih dari 50% dari sekitar 63 ribu ton menjadi hanya 28 ribu ton. Penurunan ini disebabkan oleh kapal-kapal perikanan izin Menteri (>30 GT) yang beroperasi di wilayah WPP 711 Khususnya laut Natuna Utara saat ini tidak lagi mendaratkan ikan di wilayah

Kabupaten Natuna melainkan mereka membawa ikan hasil tangkapannya ke Pelabuhan pangkalannya seperti ke PPS Nizamzachman dan PPS Cilacap, sehingga angka produksi di Kabupaten Natuna menurun drastis dibandingkan dengan tahun 2024. Tren penurunan volume juga terlihat di Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas, serta wilayah perkotaan seperti Batam dan Tanjung Pinang, meskipun dengan skala yang lebih kecil.



Gambar 1 Volume Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

Di tengah tren penurunan volume produksi di tingkat provinsi, terdapat anomali positif yang ditunjukkan oleh Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Kedua wilayah ini justru mencatatkan peningkatan volume produksi pada Semester I 2025 dibandingkan Semester I 2024. Volume produksi di Kabupaten Bintan meningkat signifikan dari 21.616,60 ton pada Semester I 2024 menjadi 30.925 ton pada Semester I 2025. Sementara itu, Kabupaten Lingga juga mengalami pertumbuhan dari 20.653,38 ton menjadi 30.432,86 ton pada periode yang sama. Peningkatan di Kabupaten Lingga bahkan lebih mencolok jika dilihat dari sisi nilai produksi, yang melonjak dari sekitar Rp861 miliar pada Semester I 2024 menjadi Rp1,85 triliun pada Semester I 2025. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas yang dihasilkan di wilayah tersebut memiliki nilai ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya pada tahun 2025.

Namun, potret kontras terlihat pada kinerja keuangan di Natuna dan Karimun. Penurunan volume di kedua wilayah tersebut diikuti oleh jatuhnya nilai produksi yang sangat dalam. Di Natuna, nilai produksi turun tajam dari Rp1,73

triliun menjadi hanya Rp560 miliar, yang menandakan hilangnya potensi ekonomi sebesar lebih dari Rp1 triliun dalam satu tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan volume produksi di wilayah sentra tersebut berdampak langsung dan masif terhadap pendapatan sektor perikanan regional, meskipun secara keseluruhan beberapa wilayah lain menunjukkan peningkatan efisiensi nilai jual seperti Batam yang volume nya turun dari 13.936,70 ton menjadi 12.693,88 ton dengan nilai produksi yg meningkat sedikit dari Rp. 477.251.219 menjadi Rp. 537.866.905. begitu juga dengan Anambas yang volume nya juga turun dari 12.704,16 ton menjadi 11.816,36 ton tetapi nilai produksinya meningkat dari Rp. 410.588.196 menjadi Rp. 486.689.365.

Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa sektor perikanan Kepulauan Riau sedang menghadapi tantangan produktivitas di wilayah-wilayah sentra tradisional seperti Natuna dan Karimun. Kebergantungan provinsi pada wilayah tertentu membuat total output sangat rentan terhadap fluktuasi produksi di sana. Di sisi lain, keberhasilan Lingga dalam melipatgandakan nilai produksinya di tengah penurunan volume provinsi memberikan pelajaran penting mengenai potensi hilirisasi atau penangkapan komoditas bernilai tinggi yang lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan sekadar mengejar kuantitas volume.

3.2 Volume Produksi Perikanan Budidaya

Subsektor perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau pada Semester 1 Tahun 2025 menunjukkan tren positif yang mempertegas transformasi sektor kelautan dari pola ekstraktif (tangkap) menuju pola produksi yang terkontrol (budidaya). Data yang disajikan berikut mencakup volume produksi budidaya di masing-masing kabupaten/kota.

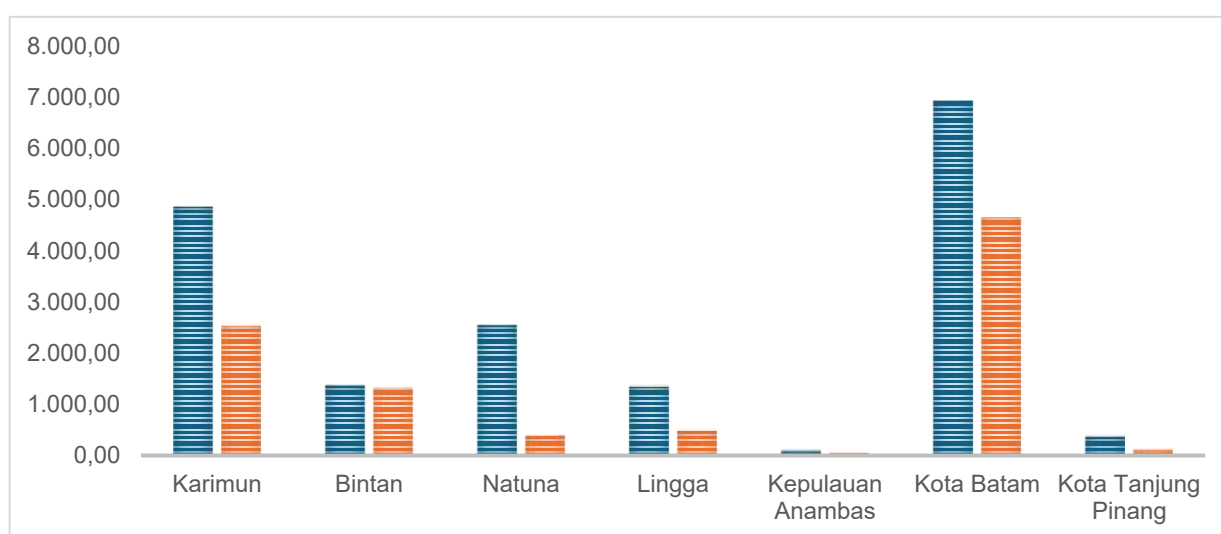
Tabel 5 Volume Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Volume (ton)	
		2024	2025*)
(1)	(2)	(3)	(4)
2101	Karimun	4.860,07	2.524,12
2102	Bintan	1.362,79	1.306,49
2103	Natuna	2.545,87	383,19
2104	Lingga	1.339,70	480,84
2105	Kepulauan Anambas	81,52	40,37
2171	Batam	6.930,64	4.650,55
2172	Tanjung Pinang	363,36	100,69
2100	Kepulauan Riau	17.483,94	9.486,24

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Keterangan: *) Data Sementara

Berdasarkan data volume produksi perikanan di Provinsi Kepulauan Riau periode 2024–2025, terlihat adanya tren penurunan yang sangat signifikan di seluruh kabupaten dan kota. Secara kumulatif, volume produksi provinsi merosot tajam dari 17.483,94 ton menjadi hanya 9.486,24 ton, atau kehilangan hampir 46% dari total output fisik dalam setahun. Penurunan ini mencerminkan kondisi kontraksi sektor perikanan yang merata di seluruh wilayah administrasi, tanpa ada satu pun daerah yang mencatatkan pertumbuhan positif.



Gambar 2 Volume Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

Penyumbang penurunan terbesar secara nominal berasal dari Kota Batam dan Kabupaten Natuna. Kota Batam, yang sebelumnya menjadi produsen volume tertinggi pada 2024 (6.930,64 ton), mengalami penyusutan menjadi 4.650,55 ton. Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di Kabupaten Natuna pada semester 1 tahun 2024 volume produksi perikanan budidaya sebesar 2.545,87 ton mengalami penurunan tajam menjadi 383,19 ton pada Semester 1 Tahun 2025. Wilayah lain seperti Karimun juga terpangkas hampir separuhnya, dari 4,8 ribu ton menjadi 2,5 ribu ton, yang mempertegas bahwa sentra-sentra produksi utama sedang mengalami kendala produktivitas yang serius.

Jika dilihat dari skala persentase, wilayah dengan volume kecil seperti Lingga, Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang juga tidak luput dari tren penurunan pada semester 1 tahun 2025. Produksi di Lingga dan Tanjung Pinang menurun lebih dari dua pertiga dari angka tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, Pada semester 1 Tahun 2025 merupakan priode sulit bagi sektor perikanan budidaya di Kepulauan Riau. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya, baik dari sisi ekologi laut, perubahan iklim, maupun efektivitas armada tangkap dan sarana pendukung di lapangan.

Tabel 6 Volume Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Produksi Budidaya*)				Total
		Laut (ton)	Payau (ton)	Tawar (ton)	Rumput Laut (ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2101	Karimun	71,43	55,62	190,630	2.206,44	2.524,12
2102	Bintan	150,05	79,08	1.077,36	-	1.306,49
2103	Natuna	359,56	-	23,63	-	383,19
2104	Lingga	16,61	449,36	14,34	0,53	480,84
2105	Kepulauan Anambas	40,37	-	-	-	40,37
2171	Batam	132,34	1.774,40	2.743,81	-	4.650,55
2172	Tanjung Pinang	21,82	-	78,87	-	100,69
2100	Kepulauan Riau	792,18	2.358,46	4.128,64	2.206,97	9.486,24

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Keterangan: (-) Tidak ada produksi, *) Data Sementara

Dengan total produksi mencapai 9.486,25 Ton, subsektor perikanan budidaya terus memperkuat perannya sebagai pilar ketahanan pangan daerah. Sinergi antara budidaya laut, payau, tawar, dan rumput laut menciptakan struktur ekonomi kelautan yang lebih variatif di tingkat provinsi.

Kota Batam mendominasi capaian ini dengan total volume produksi sebesar 4.650,55 Ton, atau menyumbang hampir 49% dari total produksi provinsi. Kekuatan Batam terletak pada Budidaya Air Tawar yang mencapai 2.743,81 Ton (tertinggi di provinsi) dan Budidaya Air Payau sebesar 1.774,40 Ton. Tingginya angka ini didorong oleh integrasi teknologi budidaya dan kedekatan logistik dengan pasar domestik maupun ekspor, yang memungkinkan Batam memaksimalkan potensi lahan terbatas untuk hasil yang optimal.

Kabupaten Karimun menempati posisi kedua dengan total 2.524,12 Ton. Menariknya, Karimun menjadi pusat utama komoditas rumput laut dengan produksi sebesar 2.206,44 Ton, yang merupakan tulang punggung produksi rumput laut di Kepulauan Riau.

Sementara itu, Kabupaten Bintan mencatatkan produksi sebesar 1.306,49 Ton, yang didominasi oleh sektor air tawar (1.077,36 Ton). Hal ini menunjukkan bahwa meski fokus wilayah terbagi dengan sektor pariwisata, intensifikasi budidaya di daratan tetap berjalan produktif.

Wilayah lainnya menunjukkan spesialisasi yang beragam namun dengan volume yang masih kompetitif yaitu Lingga (480,84 Ton) yang menunjukkan potensi besar pada budidaya air payau. Natuna (383,19 Ton) masih mengandalkan sektor budidaya laut sebagai kontributor utama. Serta kota Tanjungpinang (100,69 Ton) & Kepulauan Anambas (40,37 Ton). Meski angka produksinya relatif kecil, wilayah ini memiliki ruang ekspansi yang sangat luas, terutama dalam optimalisasi ruang laut di masa depan.

Rendahnya angka budidaya di beberapa kabupaten kepulauan dibandingkan sektor tangkapnya mengindikasikan bahwa perikanan budidaya di wilayah tersebut masih berada pada tahap pengembangan dini dan berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru.

Tabel 7 Jumlah Produksi Budidaya Ikan Laut Berdasarkan Jenis Komoditas per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025

No	Komoditas	Bintan	Karimun	Anambas	Batam	Tanjung pinang	Lingga	Natuna
1	Kerapu	97.000	2.420	40.240	35.865	9.520	14.657	56.950
2	Kakap	51.000	69.010	—	69.332	8.740	—	—
3	Bawal Bintang	1.250	—	—	27.144	—	—	—
4	Teripang	800	—	—	—	—	1.957	—
5	Rumla	—	2.206.440	—	—	—	530	—
6	Baronang	—	—	—	—	1.680	—	—
7	Lobster	—	—	—	—	—	—	1.960
8	Kakatua / Ketarap	—	—	—	—	—	—	5.240
9	Napoleon/ Ketipas	—	—	125	—	—	—	—
10	Ringgau / Gnathanodon Speciosus	—	—	—	—	—	—	—
11	Nuri-nuri	—	—	—	—	—	—	—
12	Lainnya	—	—	—	—	1.880	—	—
Jumlah *)		150.050	2.277.870	40.365	132.341	21.820	17.144	64.150

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Keterangan: *) Data Sementara, (-) Tidak ada produksi

Berdasarkan jenis spesies yang dibudidayakan, dapat disimpulkan beberapa poin penting, Rumput Laut (Rumla) Menjadi komoditas dengan volume produksi terbesar secara keseluruhan di Kabupaten Karimun yaitu sebesar 2.206.440 Kg. Hal ini menjadikan Rumput Laut sebagai penggerak utama angka statistik perikanan budidaya di Kepulauan Riau, sementara itu Ikan Kerapu Merupakan komoditas yang paling merata, diproduksi oleh seluruh kabupaten/kota. Produksi tertinggi berada di Bintan yaitu 97.000 Kg dan Natuna sebesar 56.950 Kg, Ikan Kakap dan ikan bawal bintang Menjadi andalan di Kota Batam sebesar 96.476 Kg. Lobster, Napoleon/Ketipas dan Kakatua/ Ketarap terpantau hanya diproduksi di Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan produksi 7.325 Kg.

Produksi di Karimun mencapai lebih dari 80% dari total keseluruhan produksi yang sebagian besar disumbang oleh sektor rumput laut, Diversifikasi di Tanjungpinang & Bintan Meskipun volumenya tidak sebesar Karimun, wilayah ini memiliki jenis budidaya yang lebih beragam (termasuk Baronang dan Teripang), Potensi Ekspor Keberadaan komoditas seperti Kerapu, Lobster, dan Napoleon

menunjukkan bahwa sektor budidaya laut di wilayah ini berorientasi pada pasar ekspor premium.

Tabel 8 Jumlah Produksi Budidaya Ikan Air Payau Berdasarkan Jenis Komoditas per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025

No	Komoditas	Bintan	Karimun	Anambas	Batam	Tanjung pinang	Lingga	Natuna
1	Udang Vanamei	78.000	55.080	–	1.763.378	–	448.997	–
2	Kepiting Bakau	1.080	540	–	–	–	360	–
3	Bandeng	–	–	–	11.023	–	–	–
Jumlah*)		79.080	55.620	–	1.774.401	–	449.357	–

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Keterangan: *) Data Sementara, (-) Tidak ada produksi

Berbeda dengan data budidaya laut sebelumnya, produksi budidaya air payau (tambak) pada periode ini sangat didominasi oleh Kota Batam. Komoditas Udang Vanamei menjadi kontributor tunggal terbesar yang menggerakkan ekonomi sektor tambak di wilayah ini. Udang Vanamei merupakan "primadona" budidaya tambak dengan total produksi gabungan mencapai lebih dari 2.345.455 Kg. Batam menyumbang sekitar 75% dari total produksi Vanamei di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, sementara itu komoditas Kepiting Bakau Memiliki volume produksi yang jauh lebih kecil dan bersifat sampingan. Produksi tertinggi ada di Bintan sebesar 1.080 kg disusul Karimun dan Lingga. Untuk jenis komoditas Bandeng hanya diproduksi di Kota Batam dengan volume 11.023 Kg Hal ini menunjukkan bahwa Batam memiliki infrastruktur tambak yang paling lengkap dibandingkan wilayah lain.

Tabel 9 Jumlah Produksi Budidaya Ikan Air Tawar berdasarkan Jenis Komoditas per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2025

No	Komoditas	Bintan	Karimun	Anambas	Batam	Tanjung pinang	Lingga	Natuna
1	Lele	804.000	162.000	—	802.097	52.370	8.945	11.102
2	Bawal Air Tawar	780	585	—	17.033	—	—	—
3	Patin	22.500	11.075	—	739.120	12.870	68	—
4	Nila	144.000	15.840	—	725.657	4.280	5.329	7.087
5	Mujair	—	—	—	—	2.400	—	—
6	Gurame	60.000	1.130	—	210.214	2.400	—	1.183
7	Gabus	1.080	—	—	—	—	—	—
8	Toman	30.000	—	—	—	—	—	—
9	Mas	15.000	—	—	249.689	2.750	—	4.254
10	Lainnya	—	—	—	—	1.800	—	—
Jumlah		2.154.720	381.260	—	5.487.620	157.740	28.684	47.252

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Keterangan: *) Data Sementara, (-) Tidak ada produksi

Jika dilihat dari tabel produksi ikan air tawar bahwa Pusat Produksi Utama disumbang oleh Kota Batam Dengan total produksi mencapai 5.487.620 kg, Batam menyumbang lebih dari 65% total produksi air tawar di seluruh Provinsi Kepulauan Riau Hal ini menunjukkan Batam adalah hub utama ketahanan pangan ikan air tawar di Kepulauan Riau. Sentra Produksi Sekunder berasal dari Kabupaten Bintan mencatatkan angka 2.154.720 Kg Bintan menonjol bukan hanya karena volumenya, tetapi karena keragaman jenis ikan yang paling lengkap dibandingkan wilayah lain. Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat memiliki angka nol (-) di seluruh komoditas air tawar. Hal ini mengindikasikan keterbatasan lahan atau sumber air tawar di wilayah kepulauan tersebut, sehingga kebutuhan ikan kemungkinan besar dipenuhi dari hasil laut.

Lele merupakan komoditas yang paling merata produksinya yaitu Kabupaten Bintan sebanyak 804.000 Kg dan Batam sebanyak 802.097 Kg. Tingginya angka ini disebabkan oleh masa panen lele yang cepat dan permintaan tinggi dari sektor UMKM (warung makan/pecel lele). Jenis ikan Patin, nila dan Mas paling banyak diproduksi di Kota Batam yaitu masing-masing 739.120 Kg, 725.657 Kg dan 249.689 Kg, disusul Kabupaten Bintan dengan produksi ikan nila sebanyak 144.000 Kg. dari jenis ikan Gurame produksi tertinggi dari Kota Batam sebanyak 210.214 Kg disusul Kabupaten Bintan sebanyak 60.000 Kg. Harga jual gurame yang lebih tinggi menjadikannya komoditas bernilai ekonomi penting bagi pembudidaya.

Kabupaten Bintan menjadi satu-satunya produsen Ikan Gabus dan Toman yang merupakan ikan endemik/khusus, untuk Ikan Toman sebanyak 30.000 Kg dan Ikan Gabus sebanyak 1.080 Kg. Hal ini menunjukkan adanya spesialisasi pembudidaya di Bintan untuk ikan predator yang memiliki nilai medis (Gabus) maupun hobi/konsumsi khusus (Toman).

3.3 Volume Produksi Pengolahan Perikanan

Sektor perikanan pengolahan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah. Pengolahan perikanan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendukung pemasaran produk perikanan ke pasar lokal dan internasional. Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah, telah mengembangkan industri pengolahan perikanan untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Data yang disajikan mencakup produksi pengolahan perikanan di setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah ini, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor perikanan pengolahan terhadap perekonomian daerah.

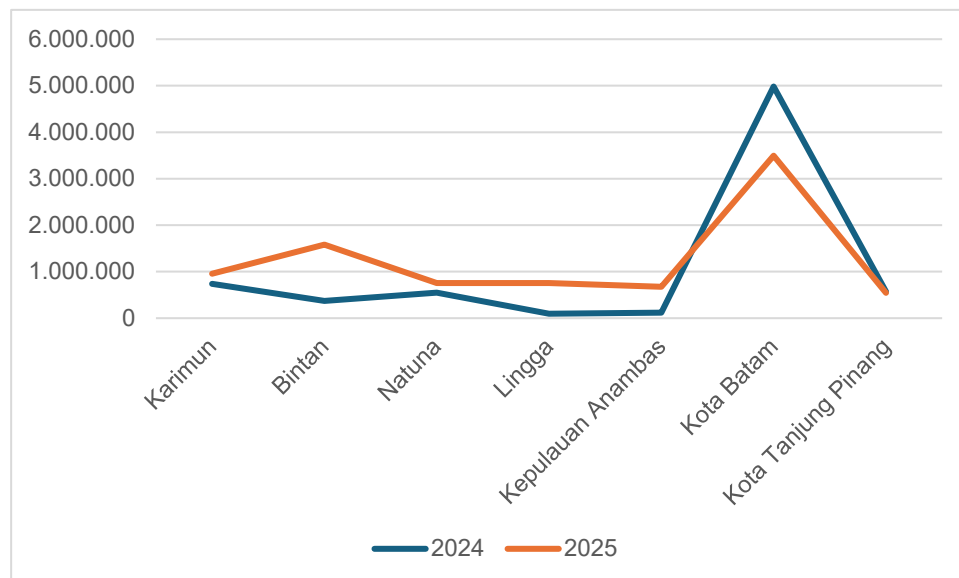
Tabel 10 Volume Produksi Pengolahan Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Volume Produksi Pengolahan (ton)	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
2101	Karimun	736.635	953.659,53
2102	Bintan	373.545	1.583.682,32
2103	Natuna	548.671	757.233,03
2104	Lingga	95.549	753.529,54
2105	Kepulauan Anambas	115.987	673.623,33
2171	Batam	4.981.932	3.494.911,47
2172	Tanjung Pinang	574.074	545.141,00
2100	Kepulauan Riau	7.426.393	8.761.780,23

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data tersebut, sektor pengolahan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan performa yang secara keseluruhan meningkat, di

mana total volume produksi pengolahan provinsi tumbuh dari 7.426.393 ton di tahun 2024 menjadi 8.761.780,23 ton pada tahun 2025.



Gambar 3 Volume Produksi Pengolahan Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

Pertumbuhan ini didominasi oleh lonjakan kapasitas pengolahan di wilayah kabupaten yang sangat drastis. Kabupaten Bintan menjadi kontributor pertumbuhan paling menonjol dengan kenaikan volume dari 373.545 ton menjadi 1.583.682,32 ton. Lonjakan yang tidak kalah signifikan juga terjadi di Kabupaten Lingga, yang mencatatkan pertumbuhan dari 95.549 ton menjadi 753.529,54 ton, serta Kepulauan Anambas yang naik dari 115.987 ton menjadi 673.623,33 ton. Wilayah Karimun dan Natuna juga menunjukkan tren positif dengan masing-masing mencapai 953.659,53 ton dan 757.233,03 ton pada tahun 2025.

Di sisi lain, terjadi anomali pada wilayah perkotaan yang justru mengalami tren penurunan. Kota Batam, yang pada tahun 2024 menjadi pusat pengolahan terbesar dengan 4.981.932 ton, mengalami penurunan volume yang cukup besar menjadi 3.494.911,47 ton pada tahun 2025. Penurunan tipis juga dialami oleh Kota Tanjung Pinang, dari 574.074 ton menjadi 545.141,00 ton. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Batam masih memegang volume tertinggi secara absolut, terjadi pergeseran konsentrasi aktivitas pengolahan dari pusat kota ke daerah-daerah kabupaten (hinterland). Secara keseluruhan, narasi angka ini menunjukkan adanya penguatan hilirisasi yang masif di tingkat

kabupaten, yang mampu menutupi penurunan produksi di wilayah perkotaan sehingga agregat provinsi tetap tumbuh positif.

3.4 Volume Ekspor Perikanan

Sektor ekspor hasil perikanan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, Kepulauan Riau telah menjadi salah satu pusat produksi perikanan yang menghasilkan berbagai produk unggulan yang diekspor ke pasar internasional. Ekspor perikanan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga berperan besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Laporan ini bertujuan untuk memaparkan data terkait volume dan nilai ekspor perikanan dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada periode tersebut.

Tabel 11 Volume Produksi Pengolahan Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

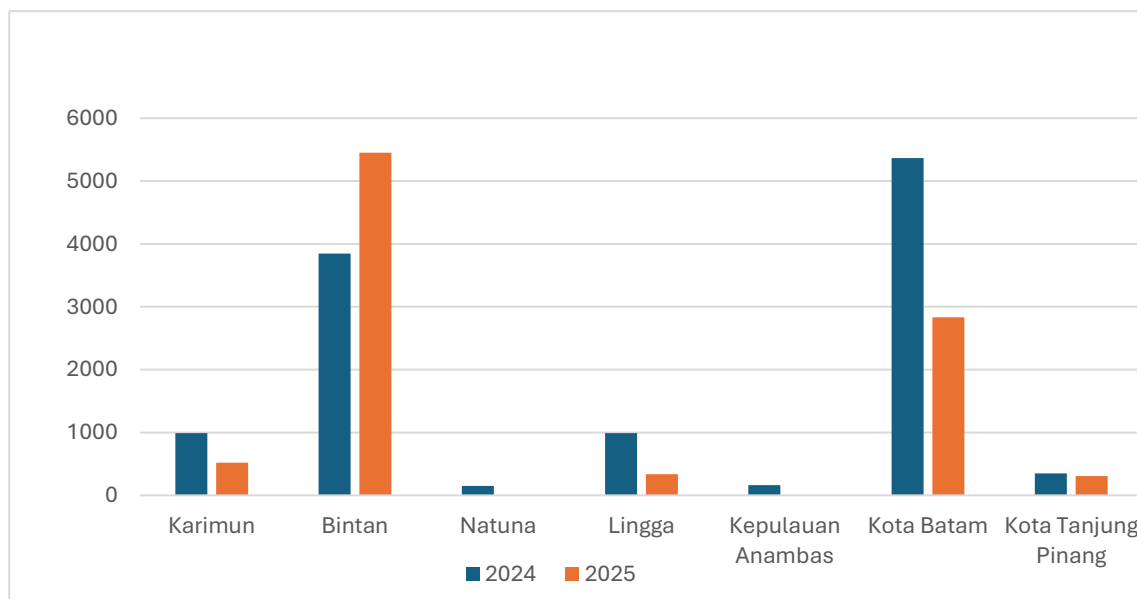
Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Volume Ekspor Perikanan (ton)		Nilai Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan (US\$)	
		2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2101	Karimun	991,17	518,35	1.219.979,50	765.288,30
2102	Bintan	3844,36	5.449,79	12.342.206,00	7.494.511,60
2103	Natuna	149,91	–	451.610,00	–
2104	Lingga	989,76	337,62	1.204.779,50	410.205,62
2105	Kepulauan Anambas	164,7	–	884.032,00	–
2171	Batam	5367,54	2.830,93	9.672.666,27	2.351.501,47
2172	Tanjung Pinang	349,9	306,77	299.179,00	280.757,18
2100	Kepulauan Riau	11.857,33	9.443,46	26.074.452,27	12.929.274,99

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Keterangan: (-) Tidak ada ekspor

Berdasarkan data kinerja ekspor perikanan Provinsi Kepulauan Riau periode semester 1 2024–2025, terlihat adanya perbedaan yang cukup tajam baik dari sisi volume maupun nilai ekonomi. Secara agregat, volume ekspor provinsi menurun dari 11.857,33 ton menjadi 9.443,46 ton, yang berdampak langsung pada merosotnya nilai ekspor hingga lebih dari separuhnya, yaitu dari

USD 26.074.452,27 pada tahun 2024 menjadi hanya USD 12.929.274,99 pada tahun 2025.



Gambar 4 Volume Ekspor Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

Penurunan drastis ini sangat dipengaruhi oleh anjloknya performa ekspor di pusat-pusat utama seperti Kota Batam, yang volume ekspornya terpengkas dari 5.367,54 ton menjadi 2.830,93 ton, dengan nilai pendapatan yang turun tajam dari USD 9,67 juta ke angka USD 2,35 juta. Untuk kabupaten Natuna dan Anambas tidak ada nilai ekspor karena aktivitas ekspor di kedua wilayah tersebut didominasi oleh komoditas ikan hidup, sedangkan parameter volume (tonase) dalam laporan ini secara spesifik mencatat kategori ikan segar dan beku. Perbedaan klasifikasi jenis komoditas inilah yang menyebabkan aktivitas ekonomi perikanan di Natuna dan Anambas tidak terinput dalam tabel volume ekspor segar/beku, sehingga secara administratif sirkulasi nilai ekonominya tidak tercermin dalam laporan ini. Karimun dan Lingga juga mengalami penurunan volume ekspor lebih dari 40%.

Di tengah tren penurunan umum tersebut, Kabupaten Bintan muncul sebagai pengecualian yang signifikan karena menjadi satu-satunya wilayah yang mencatatkan pertumbuhan volume ekspor. Bintan berhasil meningkatkan volume ekspor menjadi 5.449,79 ton pada tahun 2025. Namun, terdapat fenomena paradoks pada nilai ekspornya; meski volumenya naik, nilai

pendapatan Bintan justru turun menjadi USD 7.494.511,60. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan harga komoditas ekspor di pasar global atau pergeseran jenis produk ekspor ke komoditas dengan nilai per ton yang lebih rendah. Sementara itu, Kota Tanjung Pinang menunjukkan stabilitas relatif dengan hanya mengalami penurunan tipis baik pada volume (306,77 ton) maupun nilai (USD 280.757,18). Secara keseluruhan, narasi data ini menggambarkan tahun 2025 sebagai periode penuh tantangan bagi ekspor perikanan Kepulauan Riau, ditandai dengan hilangnya kontribusi dari beberapa kabupaten kepulauan dan melemahnya harga jual rata-rata di pasar internasional.

3.5 Jumlah Perahu/Kapal Perikanan

Jumlah armada perahu dan kapal yang beroperasi di wilayah Kepulauan Riau memberikan gambaran mengenai skala dan kapasitas produksi sektor perikanan tangkap. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi tentang jumlah perahu dan kapal penangkap ikan yang tercatat pada semester pertama tahun 2025. Data ini mencakup berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, yang mencerminkan potensi perikanan tangkap di setiap wilayah.

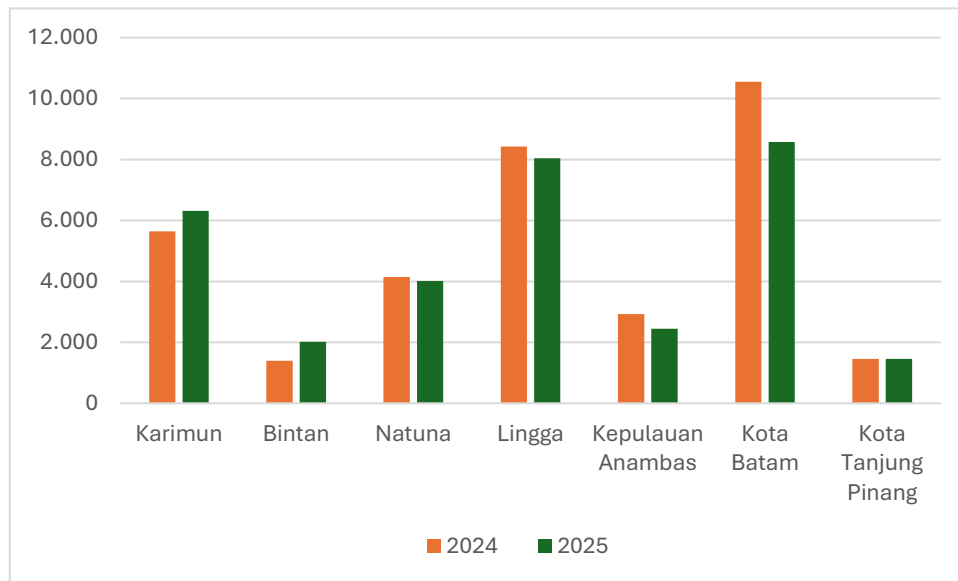
Tabel 12 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Jumlah	
		2024	2025*)
(1)	(2)	(3)	(4)
2101	Karimun	5.642	6.318
2102	Bintan	1.393	2.013
2103	Natuna	4.143	4.013
2104	Lingga	8.430	8.040
2105	Kepulauan Anambas	2.932	2.446
2171	Batam	10.557	8.572
2172	Tanjung Pinang	1.455	1.456
2100	Kepulauan Riau	34.552	32.856

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Keterangan: *) Data Sementara

Pada semester pertama tahun 2025, sektor perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan jumlah armada penangkapan. Dari yang sebelumnya di semester 1 tahun 2024 sebesar 34.552 unit menjadi 32.856 unit perahu dan kapal penangkap ikan.



Gambar 5 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

Dari grafik diatas dapat dilihat di beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan jumlah armada. Di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam mencatatkan jumlah kapal penangkap ikan terbanyak, yaitu 8.572 unit. Jumlah ini mencakup berbagai jenis kapal dengan tonase yang berbeda, yang menunjukkan bahwa Kota Batam memiliki sektor perikanan yang sangat berkembang. Sebagai pusat ekonomi dan perdagangan, Batam juga menjadi pusat kegiatan perikanan di provinsi ini, dengan armada kapal yang tidak hanya melayani kebutuhan lokal, tetapi juga ekspor ke pasar internasional.

Sementara itu, Kota Tanjungpinang memiliki jumlah kapal penangkap ikan terkecil, yakni 1.456 unit. Meskipun jumlah kapal lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, sektor perikanan tetap menjadi komponen penting dalam perekonomian daerah ini.

Selain Kota Tanjungpinang, Lingga juga mencatatkan jumlah kapal yang cukup signifikan, dengan 4.040 unit, meskipun sebagian besar kapal di daerah ini memiliki tonase kecil (KM 1-5 GT). Meskipun Lingga memiliki armada yang lebih kecil dibandingkan Kota Batam, jumlah kapal ini tetap menunjukkan peran penting sektor perikanan di wilayah ini, dengan mayoritas armadanya beroperasi di perairan terdekat.

Melihat distribusi kapal berdasarkan ukuran, kapal dengan tonase KM 1-5 GT mendominasi hampir semua wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-

kapal kecil ini umumnya beroperasi di perairan sekitar dan mencerminkan sifat perikanan yang berbasis pada kegiatan skala kecil hingga menengah, dengan fokus pada hasil tangkapan untuk konsumsi lokal atau pasar yang lebih terbatas.

Namun, di beberapa kabupaten seperti Kota Batam dan Karimun, terdapat juga kapal dengan tonase lebih besar, yaitu KM 11-20 GT dan KM 21-30 GT. Keberadaan kapal-kapal dengan tonase lebih besar ini menunjukkan adanya kegiatan perikanan skala lebih besar yang mampu menjangkau perairan yang lebih luas, serta memfasilitasi kegiatan ekspor ke pasar luar daerah. Kapal-kapal ini juga memungkinkan para nelayan untuk menangkap ikan di wilayah yang lebih jauh, meningkatkan potensi hasil tangkapan dan kontribusinya terhadap perekonomian.

Secara keseluruhan, distribusi kapal penangkap ikan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan sektor perikanan yang sangat berkembang, dengan Kota Batam sebagai pusat kegiatan perikanan terbesar. Meskipun terdapat ketimpangan dalam jumlah kapal antara wilayah yang lebih besar seperti Batam dan daerah lainnya seperti Kepulauan Anambas, sektor perikanan tetap memainkan peran penting di seluruh provinsi ini. Dominasi kapal kecil (KM 1-5 GT) di hampir semua wilayah mencerminkan adanya perikanan skala kecil yang sangat mendukung kebutuhan lokal, sementara keberadaan kapal dengan tonase lebih besar menunjukkan adanya aktivitas perikanan skala lebih besar yang berfokus pada pasar yang lebih luas.

3.6 Ketersediaan Stok Ikan

Ketersediaan stok ikan merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan dan keberlanjutan sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai salah satu daerah dengan potensi kelautan yang besar, stok ikan yang cukup akan mendukung tidak hanya kebutuhan konsumsi domestik tetapi juga kegiatan ekspor perikanan yang menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah.

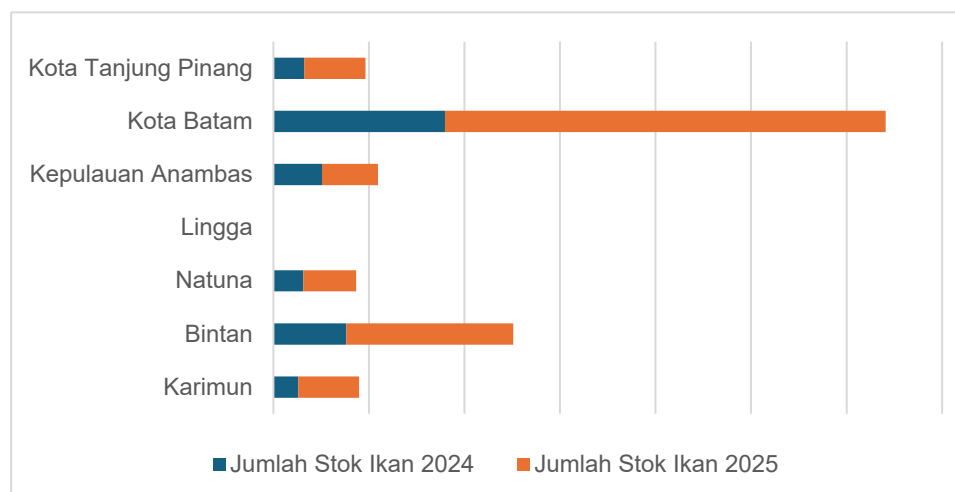
Data ini mencakup jumlah stok ikan yang tersedia berdasarkan wilayah, yang dapat menjadi indikator penting bagi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan serta perencanaan pembangunan sektor perikanan di daerah ini.

Tabel 13 Ketersediaan Stok Ikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Jumlah Stok Ikan	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
2101	Karimun	520,60	1.274,16
2102	Bintan	1.527,82	3.493,52
2103	Natuna	624,18	1.110,38
2104	Lingga	0,00	0,00
2105	Kepulauan Anambas	1.018,13	1.170,42
2171	Batam	3.589,98	9.228,44
2172	Tanjung Pinang	643,85	1.286,29
2100	Kepulauan Riau	7.924,56	17.563,21

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data jumlah stok ikan di Provinsi Kepulauan Riau periode semester 1 tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya tren penguatan ketahanan pangan sektor perikanan yang sangat signifikan di hampir seluruh wilayah. Secara agregat di tingkat provinsi, jumlah stok ikan melonjak drastis lebih dari dua kali lipat, yakni dari 7.924,56 pada tahun 2024 menjadi 17.563,21 pada tahun 2025.



Gambar 6 Ketersediaan Stok Ikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

Kota Batam menjadi wilayah dengan kontribusi stok terbesar sekaligus mencatatkan pertumbuhan yang sangat impresif, di mana cadangan ikannya meningkat dari 3.589,98 menjadi 9.228,44. Lonjakan signifikan juga terlihat di Kabupaten Bintan yang stoknya naik lebih dari 100% menjadi 3.493,52, serta

Kabupaten Karimun dan Kota Tanjung Pinang yang konsisten menggandakan jumlah stok mereka dibandingkan tahun sebelumnya. Di wilayah kepulauan luar, Natuna dan Kepulauan Anambas juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan stok yang stabil, masing-masing mencapai 1.110,38 dan 1.170,42.

Namun, terdapat pengecualian pada Kabupaten Lingga yang tercatat memiliki angka stok 0,00 selama dua tahun berturut-turut. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh hasil produksi perikanan di langsung terserap habis oleh pasar dan didistribusikan ke luar daerah secara segar. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 memiliki posisi yang lebih kuat dalam hal ketersediaan stok ikan, dengan Batam sebagai pusat logistik penyimpanan utama bagi provinsi tersebut.

3.7 Jumlah *Cold storage*

Cold storage atau penyimpanan dingin memiliki peranan penting dalam industri perikanan, terutama untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk perikanan agar dapat dipasarkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Di Provinsi Kepulauan Riau, keberadaan *cold storage* yang memadai sangat mendukung sektor perikanan, baik untuk kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, pemantauan jumlah unit *cold storage* serta kapasitas totalnya sangat penting untuk memastikan kemampuan daerah dalam menyimpan dan mengelola produk perikanan dengan baik.

Laporan ini akan mengulas jumlah unit *cold storage* dan kapasitas totalnya di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada semester pertama tahun 2025, yang memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah dalam mengelola produk perikanan.

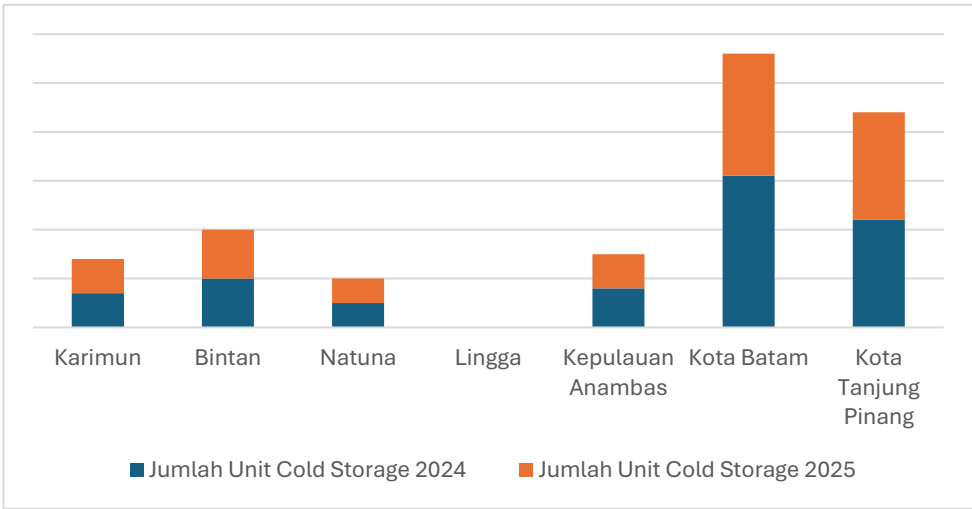
Tabel 14 Jumlah Cold storage Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Cold storage		Kapasitas Total (ton)	
		2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2101	Karimun	7	7	1520	1520
2102	Bintan	10	10	382	382
2103	Natuna	5	5	600	600
2104	Lingga	–	–	–	–
2105	Kepulauan Anambas	8	7	400	540
2171	Batam	31	25	5066	5005
2172	Tanjung Pinang	22	22	577	577
2100	Kepulauan Riau	83	76	8545	8624

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Keterangan: (-) Tidak Memiliki

Berdasarkan data infrastruktur *cold storage* di Provinsi Kepulauan Riau periode 2024–2025, terlihat adanya dinamika efisiensi pada jumlah unit operasional yang berbanding terbalik dengan peningkatan kapasitas tampung secara keseluruhan. Secara agregat, jumlah unit *cold storage* di tingkat provinsi mengalami penurunan dari 83 unit menjadi 76 unit, namun kapasitas totalnya justru meningkat dari 8.545 ton menjadi 8.624 ton. Hal ini mengindikasikan adanya tren modernisasi atau konsolidasi infrastruktur, di mana jumlah unit yang lebih sedikit mampu menampung volume yang lebih besar, memperkuat ketahanan logistik hasil laut di wilayah tersebut.



Gambar 7 Jumlah Cold storage Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Semester 1 Tahun 2024 dan 2025

Kota Batam tetap mendominasi infrastruktur ini dengan kapasitas terbesar, meskipun jumlah unitnya menyusut dari 31 unit menjadi 25 unit dengan sedikit koreksi kapasitas menjadi 5.005 ton. Sementara itu, fenomena menarik terjadi di Kepulauan Anambas; meskipun jumlah unitnya berkurang satu (dari 8 menjadi 7 unit), kapasitas totalnya justru melonjak signifikan dari 400 ton menjadi 540 ton. Kondisi stabil terlihat di Karimun, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang, di mana baik jumlah unit maupun kapasitas total tidak mengalami perubahan, dengan Karimun memegang kapasitas cadangan terbesar kedua setelah Batam yakni sebesar 1.520 ton.

Di sisi lain, Kabupaten Lingga tercatat masih belum memiliki infrastruktur *cold storage* selama dua tahun berturut-turut (0 unit), yang menjadi tantangan besar bagi daerah tersebut dalam menjaga kesegaran hasil tangkapan untuk jangka panjang. Secara keseluruhan, narasi data ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau tengah mengarah pada optimalisasi kapasitas penyimpanan, terutama di wilayah kepulauan strategis seperti Anambas, guna mendukung distribusi hasil perikanan yang lebih efektif meskipun terjadi pengurangan jumlah fisik bangunan unit di pusat-pusat perkotaan.

3.8 Luas Kawasan Konservasi Perairan

Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen penuh terhadap prinsip ekonomi biru (*blue economy*) dengan menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dan perlindungan ekologi. Pada Semester 1 Tahun 2025, pilar keberlanjutan ini ditunjukkan melalui luas kawasan konservasi yang masif dan kondisi ekosistem pesisir yang menjadi habitat utama biota laut.

Di Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari sejumlah pulau dan wilayah pesisir, penting untuk memiliki kawasan konservasi perairan yang memadai. Laporan ini bertujuan untuk memaparkan luas kawasan konservasi perairan yang terdapat di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau pada semester pertama tahun 2025, beserta status dan keterangan terkait pengelolaannya.

Tabel 15 Luas Kawasan Konservasi Perairan

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan (ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2101	Karimun	-	
2102	Bintan	982.170,72	Ditetapkan
2103	Natuna	297.414,51	Pencadangan
2104	Lingga	371.085,02	Pencadangan
2105	Kepulauan Anambas	1.265.401,51	Ditetapkan dan dikelola LKKPN Pekanbaru
2171	Batam	65.868,44	Pencadangan
2172	Tanjung Pinang	-	
2100	Kepulauan Riau	2.981.940,20	

Pada semester pertama tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas kawasan konservasi perairan yang signifikan, terutama di wilayah Kepulauan Anambas memiliki luas kawasan konservasi yang sangat besar, yaitu 1.265.401,51 ha, dan kawasan ini dikelola oleh LKKPN Pekanbaru. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kelestarian sumber daya alam laut di wilayah tersebut. dan Bintan juga memiliki kawasan konservasi yang sudah ditetapkan seluas 982.170,72 ha. Selanjutnya, Natuna dan Lingga memiliki kawasan konservasi dalam status pencadangan, yaitu 297.414,51 ha di Natuna dan 371.085,02 ha di Lingga. Status pencadangan menunjukkan bahwa kawasan ini sedang dalam proses pengelolaan atau penetapan untuk dijadikan kawasan konservasi perairan yang resmi di masa depan. Kota Batam dengan luas 65.868,44 ha juga tercatat sebagai kawasan konservasi dalam status pencadangan, yang berarti masih dalam tahap perencanaan atau pengelolaan yang lebih lanjut. Ini mencerminkan langkah proaktif daerah tersebut dalam upaya pelestarian ekosistem laut yang telah ditetapkan.

Namun, beberapa daerah seperti Karimun dan Kota Tanjung Pinang tidak tercatat memiliki kawasan konservasi perairan yang ditetapkan atau dalam status pencadangan pada data yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah ini mungkin masih perlu upaya untuk menetapkan kawasan konservasi di wilayah perairan mereka.

Tabel 16 Pembagian Zona pada Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau

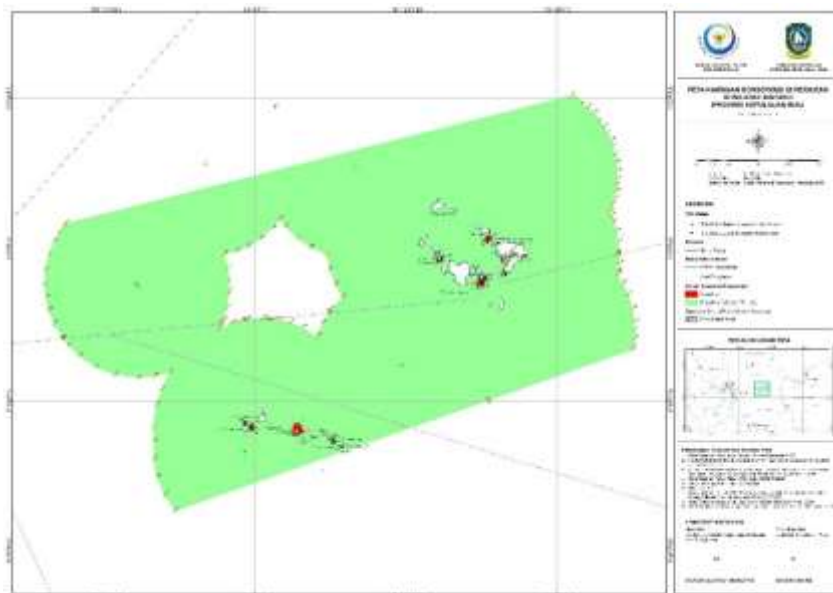
No	Wilayah	Luas Ha
1	Bintan I	
1.1	Luas wilayah	138.561,42
1.1.1	Zona Inti	2.101,87
1.1.2	Zona Pemanfaatan Terbatas	
1.1.2.1	Sub Zona Perikanan Budidaya	190,56
1.1.2.2	Sub Zona Pariwisata	1.482,82
1.1.2.3	Sub Zona Perikanan Tangkap	134.296,24
1.1.3	Zona Lainnya	489,93
2	Bintan II	
2.1	Luas wilayah	843.609,30
2.1.1	Zona Inti	1.467,46
2.1.2	Zona Pemanfaatan Terbatas	
2.1.2.1	Sub Zona Pariwisata	4.873,47
2.1.2.2	Sub Zona Perikanan Tangkap	837.219,53
2.1.3	Zona Lainnya	48,83
3	Anambas	
3.1	Luas wilayah	1.265.401,51
3.1.1	Zona Inti	3.345,83
3.1.2	Zona Pemanfaatan Terbatas	1.262.055,68

Data diatas menunjukkan pembagian zona mendetail pada tiga klaster utama untuk menjamin keberlanjutan stok ikan dan ekosistem. Dengan total luas wilayah mencapai 1.265.401,51 Ha, Anambas merupakan kawasan konservasi terbesar. Fokus utama di sini adalah perlindungan mutlak melalui Zona Inti seluas 3.345,83 Ha. Sisanya, sebesar 1.262.055,68 Ha, dikelola sebagai Zona Pemanfaatan Terbatas yang memungkinkan aktivitas manusia yang terkendali.

Kawasan Bintan dibagi menjadi dua wilayah kelola dengan karakteristik yang berbeda yaitu wilayah Bintan I (138.561,42 Ha) Dimana wilayah ini sangat dinamis dengan alokasi Sub Zona Perikanan Pariwisata (1.482,82 Ha) dan Sub Zona Perikanan Tangkap (134.296,24 Ha) yang hampir seimbang. Hal ini menunjukkan Bintan I dirancang sebagai model integrasi antara pariwisata bahari kelas dunia dan perikanan rakyat. Terdapat juga alokasi untuk Perikanan Budidaya (190,56 Ha) yang mendukung ketahanan pangan. Yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Wilayah Bintan II (843.609,30 Ha), wilayah ini lebih difokuskan pada penguatan produksi perikanan, di mana Sub Zona Perikanan Tangkap mendominasi seluas 837.219,53 Ha. Dengan Zona Inti sebesar 1.467,46 Ha, wilayah ini berfungsi sebagai area produksi utama yang tetap memiliki area perlindungan untuk regenerasi ikan.



Tabel 17 Luasan Ekosistem Pesisir di Kabupaten/Kota pada Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Terumbu Karang (ha)	Mangrove (ha)	Lamun (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2101	Karimun	427.68	14,875.11	0.00
2102	Bintan	1,168.53	8,327.19	1,897.74
2103	Natuna	55,526.89	16,480.19	468.44
2104	Lingga	42,476.33	16,480.19	5,815.57
2105	Kep. Anambas	12,508.04	359.14	-
2171	Batam	20,756.39	20,698.14	29,673.20
2172	Tanjung Pinang	122.13	2,008.96	261.18
2100	Kepulauan Riau	132,985.99	79,228.91	38,116.14

Keberhasilan zonasi kawasan konservasi ini didukung oleh kekayaan ekosistem pesisir yang menjadi habitat penting (*essential fish habitats*). Diantaranya, adalah total luas terumbu karang provinsi mencapai 132.985,99 Ha. Kabupaten Natuna memimpin dengan 55.526,89 Ha, diikuti oleh Kabupaten Lingga (42.476,33 Ha). Melimpahnya terumbu karang di dua wilayah ini menjadi alasan utama tingginya produksi perikanan tangkap, karena karang merupakan rumah bagi komoditas bernilai tinggi seperti kerapu dan kakap.

Selanjutnya, luas total mangrove mencapai 79.228,91 Ha. Kota Batam (20.698,14 Ha) dan Kabupaten Lingga (16.480,19 Ha) memiliki hutan mangrove terluas. Di Batam, keberadaan mangrove sangat krusial sebagai penyeimbang ekosistem di tengah masifnya pembangunan industri, sekaligus menjadi benteng pelindung pesisir.

Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki 38.116,14 Ha padang lamun. Secara signifikan, 29.673,20 Ha atau sekitar 77% dari total lamun berada di Kota Batam. Ekosistem lamun yang luas ini merupakan penyerap karbon (*blue carbon*) yang sangat efektif dan menjadi tempat mencari makan bagi biota laut seperti penyu dan dugong.

Data ini memberikan pesan yang jelas yaitu Keberlanjutan adalah Investasi. Tingginya angka produksi perikanan di wilayah seperti Natuna dan Bintan berkorelasi langsung dengan luasnya ekosistem terumbu karang dan wilayah konservasi yang ditetapkan. Penting untuk memperluas dan menetapkan lebih banyak kawasan konservasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan meningkatkan kualitas

pengelolaan sumber daya alam perikanan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu lebih gencar dalam menetapkan kawasan konservasi baru serta mengelola kawasan yang sudah ada agar dapat mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan kelestarian ekosistem laut di masa mendatang.

3.9. Volume Benih Ikan Bermutu dan Induk Unggul di Provinsi Kepulauan Riau

Keberhasilan sektor perikanan budidaya sangat bergantung pada kualitas input produksi, yaitu benih dan induk. Pada tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan komitmen dalam penguatan sarana produksi melalui penyediaan benih bermutu dan induk unggul guna menjamin produktivitas pembudidaya lokal.

Sebagai pusat perbenihan di Provinsi Kepulauan Riau, UPTD BBI Pengujian memegang peranan strategis dalam menjamin ketersediaan sarana produksi bagi para pembudidaya. Data tahun 2025 dibawah ini menunjukkan performa teknis balai dalam memproduksi benih bermutu serta mengelola induk unggul.

Tabel 18 Volume Benih Ikan Bermutu Menurut Jenis Ikan di Provinsi Kepulauan Riau (UPTD BBI Pengujian), Tahun 2025

No	Jenis Ikan	Volume Benih (ekor)	Ukuran Benih (cm)	Nilai Benih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kakap Putih	7,751	10	29.841.350
2	Kakap Putih	1,552	8-9	4.617.200
3	Kakap Putih	1,000	5	1.575.000
4	Kerapu cantang	6,980	10	97.720.000
TOTAL		17.283		133.753.550

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data produksi dan penjualan benih pada UPTD Balai Benih Ikan Provinsi Kepulauan Riau, total volume benih ikan yang diproduksi dan didistribusikan mencapai 17.283 ekor dengan total nilai sebesar Rp133.753.550. Jenis benih yang diproduksi terdiri dari benih kakap putih dengan beberapa ukuran, yaitu ukuran 10 cm sebanyak 7.751 ekor, ukuran 8–9 cm sebanyak 1.552 ekor, dan ukuran 5 cm sebanyak 1.000 ekor. Selain itu juga diproduksi benih kerapu cantang ukuran 10 cm sebanyak 6.980 ekor.

Produksi benih tersebut menunjukkan bahwa komoditas kakap putih masih menjadi salah satu komoditas utama yang dikembangkan oleh UPTD Balai Benih Ikan, dengan variasi ukuran benih untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya. Sementara itu, benih kerapu cantang juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam total produksi benih. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan upaya UPTD dalam mendukung penyediaan benih berkualitas bagi pengembangan usaha budidaya perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.

Angka ini juga mencerminkan bahwa produktivitas BBI Pengujan sebagai penyuplai benih terstandar. Nilai benih yang cukup tinggi menunjukkan bahwa benih yang dihasilkan memiliki kriteria mutu yang baik (seperti kecepatan tumbuh dan ketahanan penyakit), yang sangat dibutuhkan oleh pembudidaya untuk meminimalisir risiko kegagalan panen.

Dengan volume produksi benih tersebut, UPTD BBI Pengujan membantu mengurangi ketergantungan pembudidaya lokal terhadap kiriman benih dari luar daerah yang seringkali memiliki risiko stres perjalanan tinggi. Fokus pada benih bermutu dan induk unggul menunjukkan peran BBI Pengujan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan bibit yang bersertifikat dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan keuntungan usaha budidaya. Komoditas kakap putih menjadi salah satu komoditas utama yang dikembangkan karena memiliki permintaan yang cukup tinggi di kalangan pembudidaya. Sementara itu, benih kerapu cantang juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengembangan budidaya ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi. Variasi ukuran benih yang diproduksi menunjukkan upaya UPTD Balai Benih Ikan dalam menyesuaikan kebutuhan pasar dan tahapan pemeliharaan pembudidaya.

Secara keseluruhan, produksi benih ikan bermutu ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau serta meningkatkan ketersediaan benih yang berkualitas bagi para pembudidaya. Dengan dukungan induk unggul serta penerapan teknik pembenihan yang baik, keberadaan UPTD Balai Benih Ikan diharapkan mampu menjadi pusat penyediaan benih ikan yang berkelanjutan dan berkualitas di daerah.

Tabel 19 Volume Induk Unggul Menurut Jenis Ikan di Provinsi Kepulauan Riau (UPTD BBI Pengujan), Tahun 2025

No	Jenis Ikan	Volume (ekor)	Berat (kg)	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kakap Putih Calon Induk	74	51.8	16.809.100
2	Kakap Putih Induk Pemijahan Jantan	9	22.3	7.236.350
3	Kakap Putih Induk Pemijahan Betina	2	10.9	4.120.200
4	Kakap Putih Induk KJA	35	115	43.470.000
TOTAL		120		71.635.650

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya untuk induk unggul menunjukkan bahwa UPTD BBI Pengujan pada tahun 2025 mengelola 120 ekor induk unggul dengan nilai sebesar Rp71.635.650. Keberadaan 120 ekor induk ini merupakan aset vital bagi Provinsi Kepulauan Riau. Nilai per ekor yang tinggi mengindikasikan bahwa ini adalah induk terpilih yang dipelihara dengan perlakuan khusus di BBI Pengujan untuk menghasilkan benih-benih berkualitas unggul secara berkelanjutan.

Tabel 20 Nilai Retribusi Penjualan Ikan UPTD BBI Pengujan, Tahun 2023, 2024 dan 2025

Jenis Retribusi	Nilai Retribusi (Rp)		
	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Penjualan Produk Usaha Daerah (Benih Ikan)	58,323,500	54,220,425	137.839.550

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Selain mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, kegiatan produksi dan distribusi benih ikan ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan dari penjualan benih ikan. Pada tahun 2025 jumlah retribusi yang dihasilkan dari penjualan ikan adalah sebesar Rp. 137.839.550. Dengan demikian, keberadaan UPTD Balai Benih Ikan tidak hanya berperan dalam penyediaan benih bermutu bagi pembudidaya,

tetapi juga turut mendukung peningkatan pendapatan daerah serta penguatan sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan tersedianya benih ikan bermutu dan induk unggul, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha budidaya, memperkuat ketahanan sektor perikanan daerah, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kinerja sektor kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Semester 1 Tahun 2025 secara umum menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif dengan karakteristik keterpaduan yang kuat antara wilayah produsen dan pusat industri. Keberhasilan ini ditandai dengan volume produksi tangkap yang sangat masif di wilayah utara seperti Natuna, yang kemudian diimbangi oleh kuatnya sektor hilirisasi, budidaya, dan ekspor di Kota Batam serta Bintan sebagai pusat logistik regional. Ketersediaan stok ikan yang terjaga menunjukkan ketahanan pangan daerah yang stabil, didukung oleh infrastruktur rantai dingin yang memadai dan peran strategis UPTD BBI Pengujan dalam menyediakan input produksi berupa benih bermutu serta induk unggul. Selain itu, pengelolaan ruang laut melalui kawasan konservasi perairan seluas 2,98 juta hektar yang terintegrasi dengan kesehatan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun, membuktikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah meletakkan fondasi ekonomi biru yang kuat untuk menjamin keberlanjutan sumber daya ikan di masa depan.

4.2 Saran

Guna mengoptimalkan capaian pada masa mendatang, pemerintah daerah disarankan untuk mulai memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur rantai dingin dan unit pengolahan ikan di wilayah-wilayah sentra produksi seperti Lingga, Natuna, dan Anambas untuk menekan biaya logistik serta meningkatkan nilai tambah lokal di daerah asal. Fungsi UPTD BBI Pengujan juga perlu terus diperkuat kapasitas produksinya agar distribusi benih bermutu dapat menjangkau seluruh pulau secara merata untuk mendorong standarisasi kualitas budidaya provinsi. Terakhir, pengawasan ketat terhadap zona-zona inti kawasan konservasi serta program rehabilitasi rutin pada ekosistem pesisir harus tetap menjadi agenda prioritas untuk memastikan bahwa intensitas produksi saat ini tidak mengorbankan daya dukung alam, sehingga kekayaan laut Kepulauan Riau tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang secara berkelanjutan. Terakhir, perluasan kawasan konservasi

perairan akan melindungi ekosistem laut dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.